

Peranan *Inter-Governmental Group On Indonesia* (IGGI) dalam Perbaikan Perekonomian Indonesia Tahun 1967-1992

Ningsih Setiawati[✉] & Carolina Santi Muji Utami

Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Mei 2021
Disetujui Juni 2021
Dipublikasikan Agustus 2021

Keywords:
IGGI, pembangunan, ekonomi, bantuan luar negeri

Abstrak

Sumber pembangunan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru bukan hanya dari sumber daya dalam negeri saja. IGGI (*Inter Governmental Group on Indonesia*) ikut berperan dalam membantu menstabilkan ekonomi melalui hubungan bilateral dan multilateral dengan negara-negara donor. Bantuan yang diberikan IGGI merupakan faktor pendukung keberhasilan pembangunan dalam bidang ekonomi selama Orde Baru. Selain untuk menutup defisit anggaran belanja negara, dana dari IGGI digunakan untuk menjamin kelangsungan pembangunan. Alasan yang melatar belakangi penelitian ini didasarkan karena belum banyak literasi yang membahas tentang seberapa besar bantuan luar negeri yang dilakukan negaranegara Barat yang tergabung dalam forum IGGI terhadap pembangunan ekonomi Indonesia khususnya selama kurun waktu 1967 – 1992. Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan sejarah terbentuknya IGGI, menggambarkan kondisi ekonomi sebelum dan setelah berdirinya IGGI dan peranan serta dampak dari bantuan yang diberikan IGGI bagi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang mencakup pada empat hal, diantaranya: heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari penelitian ini penulis menemukan bahwa IGGI merupakan penyumbang terbesar dalam pembangunan ekonomi Indonesia selama Orde Baru. Dimana dalam pelaksanaan pemanfaatan dana tersebut ternyata mempunyai dampak positif dan negatif bagi pelaksanaan pembangunan dalam negeri Indonesia.

Abstract

Indonesia's economic development during the Orde Baru era is not only from domestic resources. IGGI also plays a role in helping to stabilize the economy through bilateral and multilateral relations with donor countries. The aids that provided by IGGI was a supporting factor for successful development in the economic sector during the Orde Baru. In addition to covering the deficit in the state budget, IGGI funds are also used to ensure the continuity of development. The reason behind this research is because there is not much literacy that discusses how much foreign aid was carried out by countries members of the IGGI forum for Indonesia's economic development, especially during the period 1968 - 1981. This research will discuss the history of the establishment of the IGGI, the economic conditions before and after the establishment of the IGGI and the impact of the aids that provided by the IGGI. This research uses historical research method which cover four procedures, including: heuristics, verification, interpretation, historiography. The results of this study the author found is that IGGI was the largest contributor to Indonesia's economic development during the Orde Baru. Where the use of these funds turned out to have positive and negative impacts on the implementation of domestic development in Indonesia.

PENDAHULUAN

Kemrosotan ekonomi Indonesia sangat parah terjadi selama tahun 1960-1965. Selama kurun waktu tersebut, pertumbuhan produk domestik bruto Indonesia sangat rendah. Laju inflasi melambung tinggi sehingga terjadi hyperinflation pada tahun 1966 mencapai 635% sehingga negara mengalami defisit yang tidak terkendali. Kondisi prasarana sangat buruk karena kurangnya dana untuk pemeliharaan. Devisa negara yang menyusut menyebabkan kelangkaan bahan baku dan suku cadang sehingga produksi industri dalam negeri menurun dan menimbulkan kelangkaan pangan (Boediono, 2016: 105). Permasalahan konfrontasi dengan Malaysia dan upaya perebutan kembali Irian Barat pada awal dekade 1960-an menyebabkan anggaran dana negara banyak tersedot untuk kepentingan non-ekonomi yang kemudian mengakibatkan ketidakseimbangan perekonomian dalam negeri. Ditambah lagi dengan terjadinya peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965 (G30S) menyebabkan banyak terjadi kerusuhan di banyak daerah dan berbagai kegiatan ekonomi terhenti. Kondisi buruk perekonomian dalam negeri ini kemudian memantik runtuhnya rezim Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno.

Situasi politik mulai membaik setelah secara *de facto* Jenderal Soeharto diangkat untuk memegang kendali pemerintahan melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada bulan Maret 1966. Dalam susunan kabinet Ampera yang disusun setelah pengangkatan Soeharto. Dalam Kabinet Ampera Presiden Soeharto menempatkan kelompok yang dikenal sebagai "Mafia Berkeley" (Emmerson, 2001: 110). Kelompok Mafia Berkeley ini adalah sejumlah teknokrat dan ahli ekonomi terdidik secara barat dari Universitas Indonesia yang dipimpin Profesor Widjojo Nitisastro, termasuk beberapa diantaranya telah memperoleh gelar dari University of California di Berkeley.

Pemerintah mengupayakan cara untuk menyusun jalan Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang mantap dan memulihkan kredibilitas pemerintahan dimata negara dan

perusahaan asing. Pemerintah menyadari bahwa untuk melakukan perbaikan perekonomian dan pembangunan nasional, kemampuan sumber-sumber dalam negeri belum memadai untuk mendukung usaha-usaha tersebut. Melihat kondisi ekonomi yang masih terpuruk sedangkan anggaran negara yang masih defisit, maka pemerintah beranggapan bahwa memanfaatkan sumber aliran dana dari luar negeri adalah pilihan yang paling efektif untuk memulai stabilisasi ekonomi. Sumber pendanaan pembangunan nasional masa awal Orde Baru banyak berasal dari bantuan luar negeri berupa hibah (*grant*) dan pinjaman luar negeri (*loan*) yang diberikan oleh negara-negara donator atau kreditor maupun badan-badan internasional yang khusus dibentuk untuk memberikan pinjaman luar negeri, seperti Bank Dunia (*World Bank*), Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*), Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fond*) dan lain sebagainya (Perwita dan Yani, 2014: 84). Melalui lembaga-lembaga internasional diatas, Indonesia mendapat bantuan kredit, tenaga ahli dan rekomendasi untuk menghadapi negara kreditor.

Atas kerja sama dengan Bank Dunia, IMF dan ADB, dibentuk suatu kelompok konsorsium yang disebut *Inter-Governmental Group on Indonesia* (IGGI) pada tahun 1967, yang terdiri juga atas sejumlah negara maju dan badan keuangan internasional, dengan tujuan untuk membiayai pembangunan ekonomi Indonesia (Kartasasmita, et al., 1995: 140). Pembahasan-pembahasan mengenai bantuan kepada Indonesia dikoordinasikan melalui IGGI, sehingga dibentuk suatu rangkaian pertemuan antara pemerintah Indonesia dengan negaranegara dan lembaga pemberi bantuan (donatur). Melalui forum-forum IGGI, Pemerintah Indonesia berkesempatan untuk menjelaskan program pembangunannya di masa yang akan datang dan memaparkan hasil-hasil yang telah dicapai sebelumnya, sehingga program bantuan yang diberikan oleh negara maupun lembaga donatur dapat disesuaikan dengan kebutuhan anggaran negara yang diperlukan. Melalui pertemuan-pertemuan di forum IGGI juga, pemerintah berhasil

mengusahakan bantuan luar negeri serta penjadwalan ulang dan peringanan syarat-syarat pembayaran kembali utang-utang peninggalan pemerintahan sebelumnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah, yaitu suatu proses suatu proses menguji, menganalisa, secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Metode sejarah dikaji melalui empat tahapan pokok yaitu pengumpulan data (heuristik), kritik sumber (verifikasi), penafsiran (interpretasi), dan penulisan sejarah (historiografi). Heuristik merupakan suatu kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data atau materi sejarah atau evidensi sejarah yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti (Gottschalk, 1986: 33). Proses pengumpulan data yang penulis lakukan dengan studi kepustakaan. Penulis mengumpulkan buku-buku dan karya ilmiah dari berbagai sumber yakni perpustakaan Pemerintah Kota Semarang, perpustakaan Universitas Negeri Semarang, Perpustakaan Nasional, perpustakaan Universitas Indonesia dan beberapa melalui akses perpustakaan online. Selain buku, jurnal, maupun artikel, penulis juga menggunakan sumber-sumber seperti arsip kementerian yang diperoleh dari Arsip Nasional, siaran media, dan surat kabar yang dikeluarkan pada masa tersebut dan berkaitan dengan topik perbaikan perekonomian dan kontribusi IGGI, penulis peroleh dari Monumen Museum Pers Solo dan Depo Suara Merdeka. Beberapa sumber penulis dapat dari pencarian tidak langsung (online) dengan mengakses website instansi, perpustakaan, situs berita, koran dan jurnal online, diantaranya website Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Tahap yang berikutnya penulis lakukan adalah melakukan verifikasi atau kritik sejarah, yaitu menilai keabsahan sumber. Verifikasi ada dua, yakni yang pertama kritik eksteren untuk menilai autensitas atau keaslian sumber dan kedua, kritik intern untuk menilai kredibilitas atau kebenaran isi (Kuntowijoyo, 2013: 77). Dalam hal ini yang dilakukan penulis adalah menguraikan dan memilah sumber secara teratur mengenai konsep dan permasalahan yang sesuai dengan penelitian ini. Terkait kritik ekstern, penulis menilai penggunaan kertas, gaya tulisan, bahasa, dan penampilan luar lainnya guna mengetahui autentisitasnya. Adapun untuk kritik intern, penulis melakukan kritik dengan membandingkan antara isi sumber yang satu dengan sumber yang lainnya untuk mendapatkan data yang akurat.

Interpretasi adalah menafsirkan data yang diperoleh setelah dilakukan verifikasi terhadap sumber. Berdasarkan data dan sumber yang ditemukan, penulis melakukan analisis dan memahami sumber yang didapat untuk melakukan pengumpulan data terkait pokok permasalahan yang penulis ingin bahas. Historiografi merupakan tahap penyajian dari hasil penelitian sejarah. Penulis memaparkan didalam pengantar berupa permasalahan, latar belakang permasalahan dalam konteks sejarah, pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian, teori dan konsep yang dipakai, dan sumber-sumber sejarah. Dalam bab hasil penelitian, penulis menyajikan fakta yang diperoleh dan disertai data yang mendukung. Kemudian dalam simpulan penulis mengemukakan generalisasi atau kesimpulan dari yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Perekonomian Indonesia Sebelum berdirinya *Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI)*

a. Pasca Kemerdekaan Indonesia

Keadaan ekonomi Indonesia sangat memprihatinkan. Hiperinflasi, terjadi di umur negara yang baru beberapa bulan karena beredarnya mata uang beberapa mata uang di masyarakat secara tidak terkendali (Poesponegoro, et al., 1984: 172-173). Pemerintah tidak dapat menyatakan bahwa mata uang-mata uang yang beredar tersebut tidak berlaku. Hal ini karena negara sendiri belum memiliki mata uang sebagai penggantinya. Akibatnya kas pemerintah kosong, sebaliknya pengeluaran negara semakin bertambah.

Di samping permasalahan mata uang, situasi keuangan yang sulit dihadapi pemerintah diperburuk dengan dilakukannya blokade laut oleh Belanda. Blokade ini menutup pintu keluar-masuk perdagangan RI yang dimulai sejak November 1945. Akibat blokade ini barang-barang dagang RI tidak dapat diekspor dan negara kekurangan bahan-bahan impor yang sangat dibutuhkan. Pajak-pajak dan bea masuk lainnya sangat berkurang.

Mempertahankan kemerdekaan saat itu adalah target utama bagi pemerintah dan masyarakat, karena itu pada masa revolusi tidak dijumpai suatu program pembangunan ekonomi yang berencana dan berjangka panjang. Penekanan program ekonomi lebih ditempatkan pada usaha pemulihan dan perbaikan keadaan serta pembiayaan perjuangan ketimbang mengupayakan pemasukan devisa negara sebagai anggaran pembiayaan pembangunan.

b. Demokrasi Liberal dan Sistem Ekonomi Nasional

Setelah pengakuan kedaulatan, pada 27 Desember 1949, pemerintah masih harus menghadapi berbagai masalah perekonomian lainnya. Perekonomian Indonesia dihadapkan pada kenyataan bahwa kondisi sarana dan prasarana produksi mengalami kerusakan berat sebagai dampak selama masa perang mempertahankan kemerdekaan. Sejak tahun 1951, volume perdagangan Indonesia di kancah internasional mulai menurun. Pemerintah berusaha membatasi krisis moneter, salah satunya dengan melakukan nasionalisasi terhadap De Javasche Bank. Kebijakan yang ditempuh kemudian oleh pemerintah adalah dengan melaksanakan program industrialisasi, yaitu usaha untuk pembangunan industri dasar, seperti pendirian pabrik-pabrik semen, pemintalan, karung, percetakan dan lain-lain. Kebijakan ini diikuti pula dengan usaha peningkatan produksi pangan, perbaikan prasarana, dan penanaman modal asing (Poesponegoro, et al., 1984: 245).

Indonesia sebagai negara yang berkembang, tidak memiliki komoditi ekspor lainnya kecuali hasil perkebunan. Pada tahun berikutnya, perkembangan ekonomi Indonesia tidak menunjukkan kestabilan. Krisis moneter justru terjadi pada tahun 1952 akibat defisit anggaran belanja mencapai Rp. 3 milyar. Sampai pertengahan periode 1960-an, pada dasarnya Indonesia belum memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Langkah-langkah yang ditempuh pemerintah hanya berupa rehabilitasi struktur perekonomian dan penanggulangan kesulitan keuangan. Defisit tersebut ditutup dengan usaha mencetak uang baru, yang berdampak pada

angka inflasi melambung. Defisit anggaran mencapai puncaknya pada 1957, mencapai 5,3 miliar.

c. Masa Ekonomi Terpimpin

Pada masa Demokrasi Terpimpin ini, kondisi perekonomian Indonesia masih sangat lemah. Ditambah dengan kondisi politik saat itu yang masih bergejolak dan berbagai pemberontakan terjadi di daerah membuat aktivitas perekonomian terganggu. Buruknya perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan orde lama ini juga disebabkan oleh keterbatasan akan faktor-faktor produksi, seperti sumber daya manusia dengan tingkat kewirausahaan yang masih rendah, tenaga kerja dengan pendidikan atau keterampilan yang belum memadai, dana dan teknologi yang masih minim untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk proses industri, serta kemampuan pemerintah sendiri untuk menyusun rencana dan strategi pembangunan yang baik.

Pada 1961, inflasi melambung tinggi mencapai kisaran angka 100 persen. Ditengah situasi ekonomi yang buruk, banyak anggaran dana negara justru dialirkan untuk mendanai sejumlah misi-misi militer dan konflik bersenjata seperti pembebasan Irian Barat dan Konfrontasi Malaysia. Pada tahun 1965, Soekarno memutuskan hubungan dengan negara kapitalis Barat dengan keluar dari IMF dan Bank Dunia, akibat peristiwa konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini berdampak pada aliran dana bantuan baik dari Amerika maupun IMF dibekukan (Tambunan, 2001: 21).

Upaya untuk mengurangi inflasi, pemerintah memberlakukan kebijakan sanering atau pemotongan nilai mata uang hingga 90%.

Tujuan lain dari sanering adalah untuk mengendalikan harga dan meningkatkan nilai mata uang. Kebijakan ini sayangnya tidak bisa mengatasi krisis yang terjadi. Daya beli masyarakat justru menurun drastis karena kebijakan tidak diikuti dengan penurunan harga barang-barang.

Pada demokrasi terpimpin ini, pemerintah lebih memprioritaskan pada masalah-masalah politik dan kurang memberi perhatian pada masalah-masalah di bidang ekonomi. Ditambah berbagai peristiwa yang terjadi selama dekade 1960-an telah menggoyahkan ekonomi Indonesia. Akibatnya pada 1960-an, ekonomi Indonesia merosot tajam. Pada puncaknya, angka inflasi melambung tinggi pada tahun 1966 mencapai 635%. Laju inflasi yang mencapai puncaknya ini diikuti dengan kemerosotan ekonomi hampir di segala bidang. Pada masa itu, Indonesia juga memiliki keharusan membayar kembali utang sekitar US\$ 530 juta.

Sejarah Berdirinya *Inter-Governmental Group On Indonesia (IGGI)*

a. Usaha Pembangunan Jangka Panjang Pertama

Untuk menanggulangi keadaan diatas, Kabinet Ampera yang baru mengambil alih kekuasaan menetapkan berbagai program dengan sasarannya adalah penekanan inflasi dan peningkatan produksi sandang pangan dan perbaikan sarana produksi. Tiga tahapan penting yang dilakukan pemerintah yakni stabilisasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi ekonomi. Tiga tahapan tersebut lalu diwujudkan ke dalam beberapa langkah seperti penghentian hiperinflasi dan memulihkan stabilitas ekonomi, penjadwalan utang luar negeri, hingga membuka pintu bagi penanaman modal asing. Pemerintah yang didukung oleh tim ekonomi di bawah pimpinan Prof. Widjojo

Nitisastro juga merancang program PJP (Pembangunan Jangka Panjang) 25 tahun yang akan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dengan Pelita (Pembangunan Lima Tahun) I dimulai pada tahun 1969. Sampai Pelita V (Tambunan, 2001: 22). Sasaran utama PJP I dalam bidang ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat dan tercapainya struktur ekonomi yang seimbang, yaitu kemampuan dan kekuatan industri yang maju didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh.

b. Sejarah Berdirinya IGGI

Sampai dengan Juni 1966, utang luar negeri Indonesia sudah mencapai \$2,21 miliar. Kondisi ekonomi yang buruk selama awal pemerintahan Orde Baru dirasakan semakin bertambah berat dengan adanya tambahan utang-utang baru. Karena situasi perekonomian dan keuangan semakin memburuk, pemerintah Indonesia mulai berusaha memperoleh persetujuan para kreditur agar dapat menunda pembayaran utang-utang tersebut. Pembicaraan mengenai penyelesaian utang-utang luar negeri Indonesia dengan negara-negara kreditur diadakan pertama kalinya di Tokyo pada 19-20 September 1966. Perundingan kemudian dilanjutkan di Paris pada 20 Desember 1966 melalui forum Paris Club.

Melalui diplomasi yang intensif dalam forum-forum tersebut kemudian muncul suatu terobosan untuk membentuk suatu forum khusus bagi negara-negara maju pemberi bantuan untuk Indonesia yang kemudian dikenal sebagai *Inter Governmental Group on Indonesia* (IGGI). IGGI pada dasarnya merupakan forum koordinasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi bantuan luar negeri yang diterima pemerintah Indonesia dengan para anggota donor. Tanggal 24 Februari

1967 kemudian diadakan sidang IGGI yang pertama. Sidang yang pertama ini diselenggarakan di Amsterdam dan dihadiri oleh 11 negara anggota, yaitu Australia, Amerika Serikat, Belgia, Belanda, Italia, Jerman Barat, Jepang, Inggris, Prancis, Kanada, dan Indonesia. Beberapa negara di luar anggota juga hadir sebagai peninjau yakni Austria, Denmark, Norwegia, Selandia Baru dan Swiss. Lembaga-lembaga internasional yang hadir adalah IMF, Bank Dunia, Bang Pembangunan Asia, UNDP, dan lembaga peninjau adalah Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

c. Jenis Bantuan IGGI

Dalam hal menerima bantuan luar negeri, pemerintah menerapkan syarat bahwa bantuan yang diterima tidak mengikat secara politis, tidak melampaui batas kemampuan negara untuk membayar kembali dan penggunaannya di alokasikan sepenuhnya dalam usaha-usaha pembangunan. Jenis bantuan yang diterima Indonesia melalui forum IGGI terdiri dari beberapa jenis bantuan, yakni (1) bantuan program (program aid); (2) bantuan pangan (food aid); (3) bantuan proyek (project aid); dan (4) bantuan teknik (technical assistance). Utang luar negeri yang Indonesia terima, baik secara bilateral maupun multilateral, banyak dalam bentuk hibah (grant) dan soft loan

Peranan Dan Pengaruh *Inter-Governmental Group On Indonesia* (IGGI) Dalam Perbaikan Ekonomi Indonesia Tahun 1967-1992

a. Peranan IGGI bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Sejak terbentuknya IGGI pada 1967, aliran pinjaman asing terus berdatangan. Dalam

rentang 1967 – 1969 saja, Indonesia memperoleh pinjaman US\$ 200 juta. Jumlah ini menyumbang 28% dari pembiayaan pembangunan pemerintah. Dengan adanya bantuan luar negeri ini pemerintah mampu membangun berbagai proyek yang berguna bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dalam negeri, seperti bendungan, irigasi, tenaga pembangkit listrik, fasilitas telekomunikasi, jembatan, jalan raya, sarana transportasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta berbagai program pengentasan kemiskinan. Pembangunan di berbagai sektor produksi sektor pertanian, industri dan sektor lainnya dimungkinkan karena pembangunan berbagai macam sarana dan prasarana yang mendukung. Pembangunan ekonomi juga didukung oleh peningkatan dan perluasan prasarana perhubungan seperti jalan, pelabuhan, dan telekomunikasi.

Dalam perkembangannya, bantuan luar negeri tidak saja digunakan dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga dalam pengembangan sektor industri manufaktur. Industri-industri Indonesia yang semula berorientasi pada barang-barang substitusi impor, bergeser ke promosi ekspor. Tahun 1968, pertumbuhan PDB Indonesia tertinggi dicatat, yakni mencapai 10,92%. Sementara di era reformasi, pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat pada tahun 2007, hanya sebesar 6,35%. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), selama periode Orde Baru, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai rata-rata 7% per tahun. Pertumbuhan yang tinggi ini menghasilkan peningkatan pendapatan per kapita lebih dari 10 kali lipat dari tahun 1969 dan berhasil menekan angka inflasi dari 650% pada tahun 1966 menjadi 120% pada tahun 1967, bahkan menekan tingkat inflasi sebesar 85% pada tahun 1968.

b. Dampak dari Bantuan *Inter-Government Group on Indonesia (IGGI)*

Masalah yang sering muncul mengenai bantuan/utang luar negeri, khususnya di negara berkembang adalah besarnya beban utang yang harus ditanggung, bahkan sampai merugikan pembangunan atau membuat rakyat di negara peminjam menderita. Padahal tujuan utama peminjam adalah untuk menjalankan pembangunan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan di negara peminjam. Dalam teori ketergantungan (*dependensia*), menjelaskan bahwa utang luar negeri dalam jangka pendek dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, karena dengan adanya utang tersebut dapat memberi bantuan dana untuk memperbaiki kondisi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Namun dalam jangka panjang, negara akan terbebani dengan pembayaran kembali utang luar negeri yang terus meningkat setiap tahun.

Permasalahan utang luar negeri bukan saja berdampak merugikan pemerintah sebagai peminjam, tetapi juga masyarakat sebagai pihak yang ikut menanggung beban pembayaran utang beserta bunganya. Dampak yang dirasakan masyarakat diantaranya dalam bentuk peningkatan pembayaran pajak, pengurangan subsidi, atau penundaan gaji pegawai negeri dalam kurun waktu tertentu karena pemerintah memerlukan dana untuk membayar kewajiban utang luar negerinya. Akumulasi utang luar negeri Indonesia dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia memiliki ketergantungan dalam hal pendanaan luar negeri. Pada tahun 1968, seluruh dana pembangunan masih berasal dari bantuan luar negeri. Dalam kurun waktu 25 tahun sejak Repelita I, pin-

jaman luar negeri pemerintah Indonesia meningkat dari US\$ 266 juta pada tahun 1968 diperkirakan menjadi US\$ 59 miliar pada tahun 1993/94.

Selama 25 tahun, sokongan dana dari IGGI berjalan mulus. Hingga pada tahun 1992, dalam forum internal IGGI mulai terjadi konflik karena bantuan yang diterima Indonesia mulai dikaitkan dengan isu politik dan HAM. Belanda yang saat itu menjabat sebagai negara koordinator IGGI mengecam dan menangguk bantuan ke Indonesia akibat tragedi Santa Cruz di Timor Timur. Pada Maret 1992, Soeharto menegaskan sikap akan menolak semua bantuan ekonomi dan dana bantuan IGGI jika organisasi tersebut masih diketuai Belanda. Akibatnya forum IGGI dibubarkan namun pemerintah Prawiro menyebutkan bahwa Indonesia masih membutuhkan bantuan luar negeri. Indonesia kemudian menerima usulan untuk dibentuk forum baru dengan nama CGI (Consultative Group on Indonesia) yang diprakarsai Bank Dunia dan diketuai Jepang.

SIMPULAN

Sumber pendanaan pembangunan nasional masa awal Orde Baru banyak berasal dari bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara-negara donator maupun badan-badan internasional yang khusus dibentuk untuk membantu pembangunan ekonomi Indonesia yang dibentuk pada 1967 dan dikenal sebagai *Inter-Governmental Group on Indonesia* (IGGI). Pembahasan-pembahasan mengenai bantuan kepada Indonesia dikoordinasikan melalui IGGI, sehingga dibentuk suatu rangkaian pertemuan antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara dan lembaga anggota IGGI. Negara dan lembaga peserta IGGI adalah Australia, Belgia, Kanada, Prancis, Jerman Barat, Italia, Jepang, Belanda, Selandia Baru, Swiss, Inggris dan Amerika Serikat, IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan UNDP (*United Nations Development Programme*). Melalui pertemuan-pertemuan di forum IGGI, pemerintah berhasil mengusahakan bantuan luar negeri serta penjadwalan ulang dan peringanan syarat-syarat

pembayaran kembali utang-utang peninggalan pemerintah.

Sejak terbentuknya IGGI pada 1967, aliran pinjaman asing terus berdatangan. Dalam rentang 1967 – 1969, Indonesia memperoleh pinjaman US\$ 200 juta. Jumlah ini menyumbang 28% dari pembiayaan pembangunan pemerintah. Utang luar negeri telah memainkan peran yang sangat besar sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan untuk menutupi kelangkaan modal di dalam negeri. Dalam kurun waktu yang singkat, sejak berdirinya pada 1967 sampai setidaknya tahun 1981, IGGI telah menjadi penyumbang terbesar dalam pembangunan ekonomi Indonesia, sehingga dalam kurun waktu tersebut pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai rata-rata diatas 7% setahun. Angka pertumbuhan tersebut merupakan suatu rekor pencapaian sejarah ekonomi modern Indonesia.

Dalam kurun waktu 25 tahun sejak 1968, pinjaman luar negeri pemerintah Indonesia meningkat dari US\$ 266 juta pada tahun 1968 diperkirakan menjadi US\$ 59 miliar pada tahun 1993/94. Kewajiban pembayaran kembali cicilan beserta bunga utang luar negeri ini sangat membebani anggaran belanja pemerintah, sedangkan anggaran pemerintah tersebut sumber penerimaannya sebagian besar berasal dari pajak yang ditarik dari masyarakat. Beban utang luar negeri pada akhirnya memberatkan masyarakat dalam bentuk pajak dan berbagai pungutan lainnya. Selain itu, dalam pelaksanaannya ternyata bantuan ekonomi yang diterima Indonesia mulai dikaitkan dengan urusan politik. Akibatnya pada tahun 1992, forum IGGI dibubarkan dan dibentuk forum yaitu CGI (Consultative Group on Indonesia).

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono. 2016. *Ekonomi Indonesia*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Emmerson, Donald K. 2001. *Indonesia Beyond Soeharto* (Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kartasmita, Ginandjar, dkk. 1995. *30 Tahun Indonesia Merdeka 1965 – 1973* (Jilid 3).

- Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Kuntowijoyo. 2013. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Gottschalk, Louis. 1986. Mengerti Sejarah. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Perwita, Anak Agung Bayu, dan Yanyan Mochamad Yani. 2014. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Poesponegoro, Marwati Djoened, dkk. 1984. Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI, Jakarta: Balai Pustaka.
- Tambunan, Tulus T. H. 2001. Perekonomian Indonesia; Teori dan Temuan Empiris. Jakarta: Ghalia Indonesia.